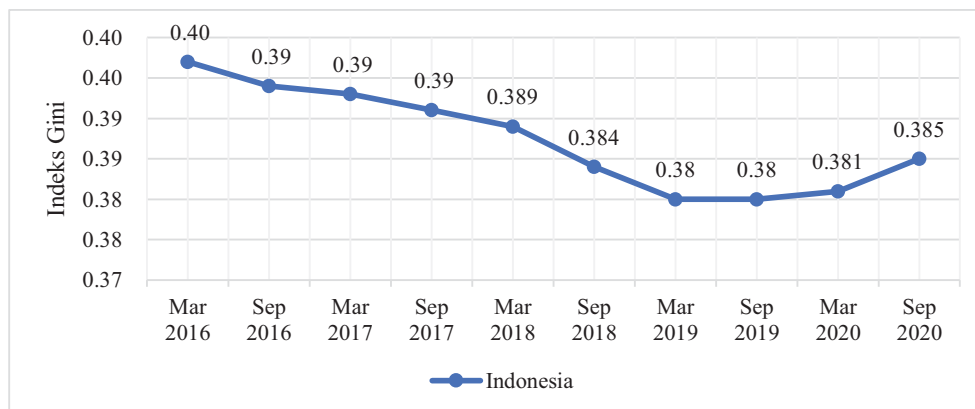


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan sebuah permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia baik negara maju ataupun negara berkembang. Distribusi pendapatan penduduk dalam setiap negara dapat dikategorikan merata atau tidak merata. Distribusi pendapatan dikatakan merata apabila pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi dibagikan secara merata kepada setiap penduduk di wilayah tersebut. Distribusi pendapatan dikatakan terjadi ketimpangan apabila sebagian besar dari pendapatan tersebut hanya dibagikan pada sebagian kecil penduduk di wilayah tersebut (Todaro & Smith, 2012).

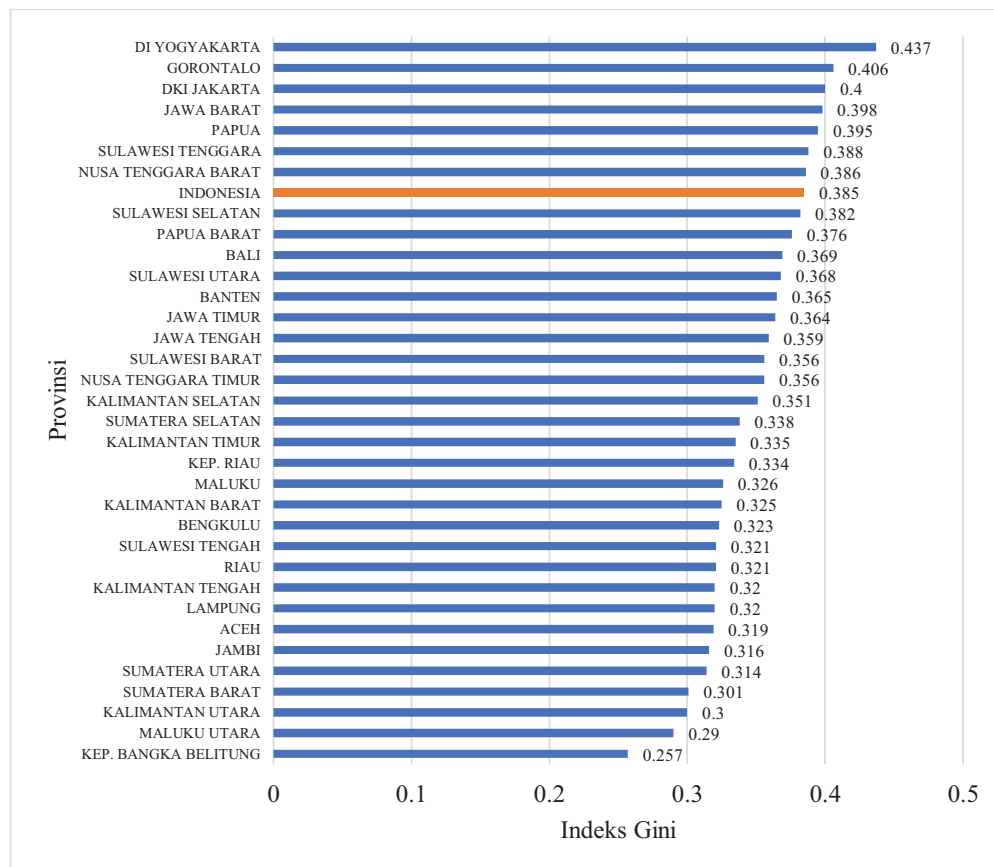


Gambar 1. 1
Perkembangan Indeks Gini Indonesia Maret 2016—September 2020

Sumber: BPS (2020)

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan indeks gini Indonesia pada periode Maret 2016—September 2020. Pada Maret 2016 hingga Maret 2019 angka indeks gini Indonesia terus mengalami penurunan dari 0,40 menjadi 0,38. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia semakin merata. Pada September 2019, angka indeks gini mulai mengalami

peningkatan dan pada September 2020 indeks gini Indonesia menyentuh angka 0,385 yang menunjukkan distribusi pendapatan semakin tidak merata. Indeks ini memiliki angka berkisar antara 0 dan 1, angka indeks gini yang mendekati 0 memiliki arti distribusi pendapatan dalam masyarakat makin merata, namun sebaliknya apabila angka indeks gini mendekati 1 memiliki arti distribusi pendapatan dalam masyarakat makin tidak merata (BPS).



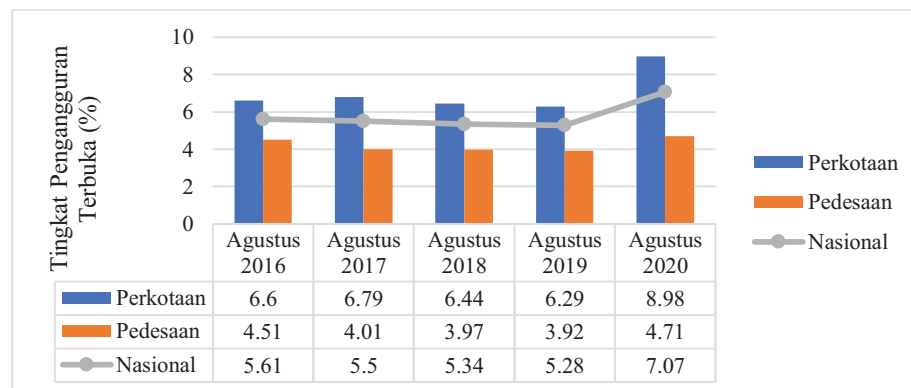
Gambar 1. 2
Indeks Gini 34 Provinsi di Indonesia Periode September 2020

Sumber: BPS (2020)

Gambar 1.2 merupakan angka indeks gini 34 Provinsi di Indonesia pada periode September 2020 berdasarkan angka tertinggi hingga terendah. Pada tahun 2020 indeks gini DI Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki angka ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi di Indonesia, angka ini mencapai 0,437. Rata-rata indeks gini Indonesia menempati urutan kedelapan tertinggi

setelah DI Yogyakarta, Gorontalo, DKI Jakarta, Jawa Barat, papua, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat. Semakin tinggi angka ketimpangan distribusi pendapatan menandakan bahwa distribusi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi yang dibagikan pada penduduk di wilayah tersebut kurang merata (Todaro & Smith, 2012).

Dalam jangka panjang, tingginya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat seperti menurunnya kualitas pendidikan dan meningkatnya pengangguran. Pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, artinya pengangguran dapat meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan (Tareh *et al.*, 2021). Temuan ini sejalan dengan penelitian (Cysne & Turchick, 2012) yang mengklaim bahwa ada korelasi positif antara pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan, asalkan tingkat pengangguran, dan koefisien Gini masing-masing tidak lebih besar dari 15% dan 28%.



Gambar 1.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia Agustus 2016 – Agustus 2020

Sumber: BPS, 2020

Berdasarkan Gambar 1.3, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2016 hingga Agustus 2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan, namun pada Agustus 2020 mengalami lonjakan yang cukup tinggi yaitu 7,07% meningkat 1,28 poin dari Agustus 2019. Provinsi dengan TPT tertinggi di Indonesia pada Agustus 2020 diantaranya Sulawesi Utara 7,37%, Maluku 7,57%, Kepulauan Riau 10,34%, Jawa Barat 10,46%, Banten 10,64%, dan DKI Jakarta

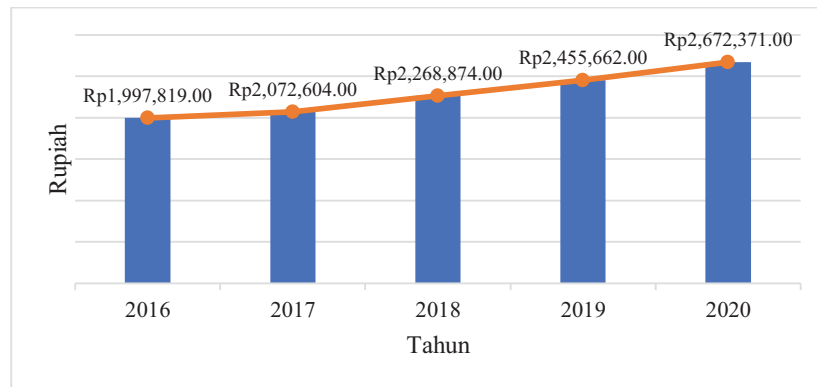
10,95%. Pengangguran merupakan permasalahan ekonomi secara makro dan memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan seseorang, hilangnya pekerjaan dapat dinilai sebagai penurunan standar hidup bagi seseorang (Mankiw, 2018).

Ketimpangan distribusi pendapatan pada negara berkembang dapat disebabkan diantaranya tingginya pertumbuhan penduduk sehingga mengakibatkan pendapatan perkapita menurun. Pendidikan berhubungan erat dengan kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih layak. Pendidikan masyarakat di suatu daerah akan mempengaruhi distribusi pendapatan pada masyarakat di daerah tersebut. Pendidikan dapat meningkatkan pendapatan individu dikarenakan pendidikan meningkatkan produktivitas (Borjas, 2015:229).

Kondisi pendidikan masyarakat yang memadai diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pendapatan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Qian & Fan, 2020) yaitu saat terjadi pandemi covid-19 orang tidak berpendidikan sekolah menengah mungkin kehilangan semua pendapatan mereka dibandingkan dengan orang berpendidikan universitas. Penelitian yang juga dilakukan oleh (Campos *et al.*, 2016), dimana telah ditemukan pengaruh positif yang signifikan secara statistik dari tahun pendidikan terhadap pendapatan yang diperoleh di semua spesifikasi model penelitian dalam jurnal.

Pendidikan merupakan suatu faktor penting yang bisa mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Pendidikan mempengaruhi seseorang dalam mendapatkan pekerjaan, makin tingginya individu mendapatkan pendidikan maka makin tinggi status pekerjaan yang didapatkannya, sehingga pendidikan berkontribusi dalam menentukan tingkat upah seseorang (Hendajany & Rizal, 2020). Secara empiris, beberapa studi telah melakukan penelitian efek upah minimum terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, beberapa hasil menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan yang artinya kenaikan upah minimum dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan meningkatkan pendidikan (Taresh *et al.*, 2021). Upah mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja, makin tinggi upah yang ditawarkan akan makin banyak pula penduduk usia kerja yang memilih masuk

ke pasar tenaga kerja dan akan meningkatkan jumlah angkatan kerja (Kurose, 2013).



Gambar 1. 4
Upah Minimum Indonesia Tahun 2016 - 2020

Sumber: BPS, 2020

Gambar 1.3 menunjukkan rata rata upah minimum di Indonesia pada tahun 2016—2020. Rata-rata upah minimum di Indonesia selalu meningkat dari Rp 1,997,819 hingga Rp 2,672,371. Kenaikan upah minimum setiap tahunnya diharapkan untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

Ketimpangan distribusi pendapatan telah meningkat di hampir semua wilayah dalam beberapa dekade terakhir, tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia sebagai suatu pertimbangan untuk merencanakan pembangunan. Sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 10, disparitas yang melebar ini membutuhkan kebijakan yang baik untuk memberdayakan mereka yang berpenghasilan rendah, dan mendorong inklusi ekonomi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras atau etnis. Karena itu, dengan melihat latar belakang tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan guna melihat faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan dari segi tingkat pengangguran, tingkat partisipasi angkatan kerja, pendidikan, upah minimum provinsi/ regional, dan tahun adanya pandemi covid-19.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penelitian (Taresh *et al.*, 2021) yang menyatakan bahwa pengangguran, pendidikan, dan upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian ini mencoba melengkapi penelitian yang sudah dahulu dilakukan oleh (Hindun *et al.*, 2019; Lee & Lee, 2018). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terdapat pada variabel penelitian, metode penelitian, dan periode penelitian yang lebih baru.

Penelitian ini menggunakan variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pendidikan SMA dan perguruan tinggi, Upah minimum Provinsi/ Regional (UMR), dan tahun adanya pandemi covid-19. Wilayah observasi yaitu 34 Provinsi di Indonesia dengan periode waktu tahun 2016—2020 data semesteran. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS dan Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker). Diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dari segi pengangguran, partisipasi angkatan kerja, pendidikan, dan upah minimum.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Jumlah Pekerja Lulusan SMA (LNEDU1), Jumlah Pekerja Lulusan Perguruan Tinggi (LNEDU2), Upah Minimum Provinsi/ Regional (LNUMR), dan Tahun adanya pandemi covid-19 (COV) secara parsial dan simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel *Ordinary Least Squares* (OLS) dengan variabel dependen adalah ketimpangan distribusi pendapatan dihitung dengan Indeks Gini dan variabel independen meliputi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Jumlah

Pekerja Lulusan SMA (LNEDU1), Jumlah Pekerja Lulusan Perguruan Tinggi (LNEDU2), Upah Minimum Provinsi/ Regional (LNUMR), dan Dummy Covid (COV). Penelitian ini memakai data sekunder yang diperoleh melalui BPS dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan periode observasi 2016—2020 data semesteran di 34 Provinsi Indonesia, diolah menggunakan *software STATA 13*.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Jumlah Pekerja Lulusan SMA (LNEDU1), Jumlah Pekerja Lulusan Perguruan Tinggi (LNEDU2), Upah Minimum Provinsi/ Regional (LNUMR), dan Dummy Covid (COV) secara simultan memiliki hubungan yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan variabel TPT memiliki nilai koefisien 0,0005087 dan nilai probabilitas 0,501. Variabel TPAK memiliki nilai koefisien sebesar 0,0005526 dan nilai probabilitas sebesar 0,180. Variabel LNEDU1 memiliki nilai koefisien sebesar -0,0221583 dan nilai probabilitas sebesar 0,065. Variabel LNEDU2 memiliki nilai koefisien sebesar 0,0005105 dan nilai probabilitas sebesar 0,948. Variabel LNUMR memiliki nilai koefisien sebesar -0,0163876 dan nilai probabilitas sebesar 0,038. Variabel COV memiliki nilai koefisien sebesar -0,0026239 dan nilai probabilitas sebesar 0,040. Hal ini membuktikan bahwa dilihat dari segi pendidikan, upah minimum provinsi/ regional, dan adanya pandemi covid-19 berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

1.6 Kontribusi Riset

Penelitian ini bermanfaat guna mengetahui faktor yang diduga mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di 34 provinsi di Indonesia yaitu TPT, TPAK, jumlah tenaga kerja lulusan SMA dan perguruan tinggi, Upah Minimum Provinsi, dan tahun adanya pandemi covid-19. Selain itu, dapat

memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan untuk mengurangi masalah ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi riset, dan sistematika penelitian.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mencantumkan teori yang menjadi pedoman dan pembahasan dalam penelitian, penelitian-penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan pendekatan penelitian, model empiris, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, serta teknik analisis yang akan digunakan.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum variabel operasional pada tahun penelitian, statistik deskriptif variabel, hasil estimasi dan pembuktian hipotesis, serta interpretasi hasil dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan ringkasan hasil penelitian, simpulan, saran, serta keterbatasan penelitian yang dirasakan selama melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN